



RENSTRA LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MIMIKA

NOMOR HK.02.02.22C.12.25.98 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Mimika.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 5 Desember 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika,



RUDOLF SURYA PANDUWINATA BONAY

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Mimika dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.

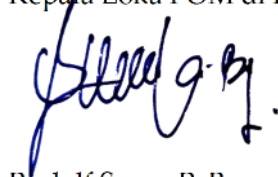
Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan Badan POM. Pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, antara lain keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, disparitas akses informasi, serta rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai regulasi. Di sisi lain, terdapat peluang besar berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk yang aman, pertumbuhan UMKM pangan lokal, serta semakin kuatnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga dan organisasi masyarakat, ataupun mitra strategis lainnya.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pengawasan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Setiap strategi, program, dan indikator kinerja yang termuat di dalamnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif sesuai mandat Badan POM Republik Indonesia dan kebutuhan masyarakat khususnya di provinsi Papua Tengah.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik melalui pemikiran, masukan, maupun dukungan dalam proses perumusan. Kerja sama dan kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat memberikan arah yang jelas serta menjadi instrumen penggerak bagi peningkatan mutu layanan pengawasan obat dan makanan di daerah, demi terwujudnya masyarakat Papua Tengah yang sehat, produktif, dan terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan.

Mimika, 5 Desember 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rudolf Surya P. Bonay'.

Rudolf Surya P. Bonay, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024	4
1.1.2 Aspirasi Stakeholder.....	19
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	20
1.2.1 Kekuatan (<i>Strength</i>).....	21
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	29
1.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>).....	34
1.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>)	41
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	49
2.1 Visi.....	49
2.2 Misi.....	50
2.3 Tujuan	51
2.4 Sasaran Kegiatan	52
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	68
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	68
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UPT	70
3.3 Program dan Kegiatan	76
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	78
4.1 Target Kinerja	78
4.2 Kerangka Pendanaan.....	80
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN	83
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Daerah Pengawasan Loka POM di Kab. Mimika.....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Mimika	2
Gambar 1.3 Nilai Kinerja Loka POM Mimika Tahun 2021-2024.....	7
Gambar 1.4 Grafik Kepegawaian.....	24
Gambar 1.5 Diagram Pentahelix	28
Gambar 1.6 Peta Daerah Pengawasan Loka POM di Kab. Mimika.....	33
Gambar 1.7 Overview Pendampingan UMKM Tahun 2022-2025	37
Gambar 2.1 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024	4
Tabel 1.2 Nilai Kinerja Loka POM Mimika Tahun 2021-2024	6
Tabel 1.3 Data Kompetensi	24
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Loka POM Mimika	25
Tabel 1.5 Perencanaan SDM Tahun 2025-2029	30
Tabel 1.6 Matriks Ringkasan Analisis SWOT	48
Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM	57
Tabel 2.2 Indikator Resiko	61
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi.....	73
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Utama dan Target Kinerja.....	78
Tabel 4.2 Kerangka Pendekatan Berdasarkan Pendekatan.....	80
Tabel 4.3 Kerangka Pendekatan Berdasarkan Sumber Dana	81

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang mengadopsi struktur Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 salah satunya adalah Transformasi Sosial yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran BPOM diperlukan dalam penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Penguatan ini diimplementasikan dengan meningkatkan efektivitas obat dan makanan melalui perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko. Jejaring pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM merupakan NRA (National Regulatory Authority) yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (international network). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua Tengah aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika meliputi seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah di antaranya Kab. Mimika, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya. Daerah pengawasan ini hanya dapat ditempuh melalui Transportasi Jalur Udara.



Keterangan Warna Peta Provinsi:
 Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan

UPT	Wilayah Kerja
Loka POM Mimika	Kab. Mimika
	Kab. Deiyai
	Kab. Dogiyai
	Kab. Nabire
	Kab. Paniai
	Kab. Puncak Jaya
	Kab. Intan Jaya
	Kab. Puncak

Gambar 1.1 Peta Daerah Pengawasan Loka POM di Kab. Mimika

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten mimika memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Mimika

Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2021, adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Mimika diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19

Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan memerlukan rencana strategis agar sistem pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Rencana strategis ini dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mencapai visi dan misinya selama lima tahun ke depan dan juga dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan makanan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi Satker mandiri mulai tahun 2021.

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024

KODE	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
		T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	
SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika																
1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	80,30	99,38	83,60	69,77	83,46	86,60	83,24	96,12	90,00	98,78	109,76	98,80	95,51	96,67	
1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78	80,49	103,19	80,50	55,26	68,65	82,50	89,19	108,11	84,50	100,00	118,34	94,60	84,78	89,62	
1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81	75,76	93,53	85,00	65,63	77,21	90,00	84,13	93,48	91,00	95,31	104,74	95,40	94,03	98,56	
1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	66	100	151,52	95,00	76,92	80,97	96,00	100,00	104,17	97,00	100,00	103,09	100,00	94,12	94,12	
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika																
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	93,67	107,67	91,00	88,46	97,21	92,00	100,00	108,70	94,00	100,00	106,38	100,00	87,50	87,50	
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	90,30	164,18	90,00	66,67	74,08	92,00	83,64	90,91	93,00	64,83	69,71	75,00	74,88	99,84	
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	85	150	176,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	46	28,57	62,11	50,00	33,33	66,66	55,00	66,67	121,22	60,00	58,33	97,22	65,00	66,67	102,57	
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	55	55,67	101,22	63,00	53,96	85,65	66,00	56,72	85,94	68,00	66,67	98,04	71,00	73,10	102,96	

KODE	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C
2.6	Persentase Keterlibatan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	61,50	64,74
2.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	90,00	116,88	79,00	50,00	63,29	81,00	100,00	123,46
SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika															
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	92,19	128,04	92,00	95,04	103,30	92,90	93,02	100,13	93,80	96,15	102,51	97,00	97,05	100,05
SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan															
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	55	110,01	50,00	52,97	105,94	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	53	106,00	50,00	51,00	102,00	50,00	52,00	104,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00
SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika															
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35,00	38,33	109,52	42,00	100,00	238,10	50,00	200,00	400,00	85,00	92,50	108,82	87,00	14,17	16,29
SK 6.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal							2,25	1,50	66,67	2,50	3,00	120,00	3,00	3,60	120,00
SK 7.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Mimika													88,75	85,19	95,99
SK 8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
8.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
8.2	Nilai Pengelolaan Kearsipan													79,96	83,71	104,69
8.3	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Mimika							80,6	65,51	81,28	82,2	76,01	92,47	74,29	74,98	100,93
8.4	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	90	100	111,11									
8.5	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	80	100	125									
SK 9.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Mimika	75	80,19	106,92	81,00	83,33	102,88	82,00	85,71	104,52	83,00	89,47	107,80	89,50	85,94	96,02
SK 10.	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel															

KODE	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C
10.1	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70,00	100,00	142,86
10.2	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													66,00	91,21	138,20
10.3	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60,00	96,64	161,07
10.4	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika				90,00	89,62	99,58	90,60	90,10	99,45	91,80	86,89	94,65	89,68	85,13	94,93
10.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26	95	100	105,26									

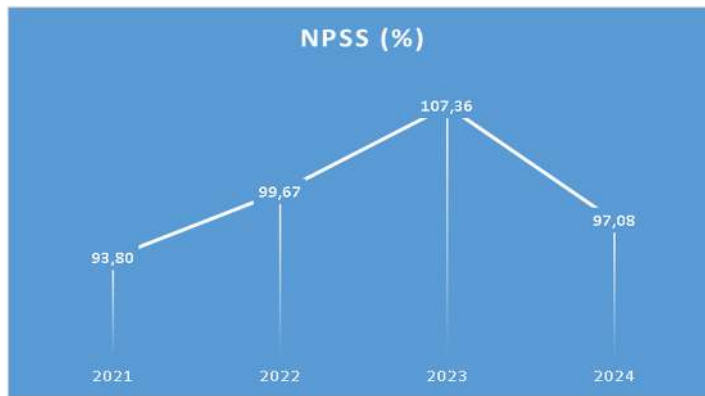
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama 5 (Lima) tahun diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan penilaian kinerja dari Loka POM di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2023 namun kembali menurun pada tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024

No	Tahun	NPSS (%)
1	2021	93,80
2	2022	99,67
3	2023	107,36
4	2024	97,08

(sumber : Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024)

Selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2021 hingga 2023 bergerak naik secara signifikan, namun kembali menurun pada tahun 2024. Terkait hal ini, Loka POM di Kabupaten Mimika berupaya memperbaiki capaian kinerjanya pada periode selanjutnya dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan maupun menyusun strategi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kembali capaian kinerja Loka POM pada periode selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Mimika menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu Stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024 yaitu :

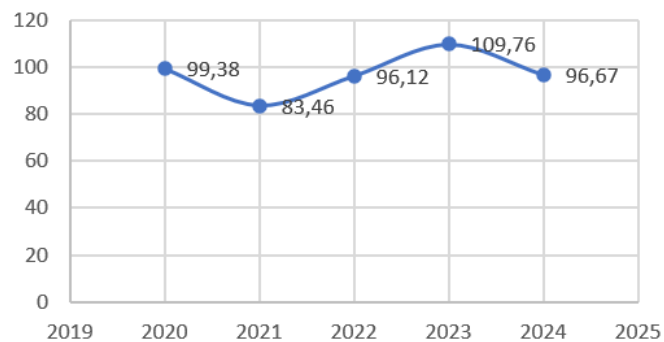
- a. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) yang mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- b. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) yang mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- d. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mencakup pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

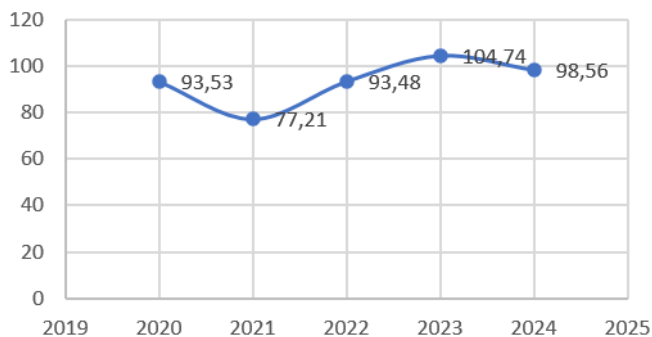
a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



c. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



d. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



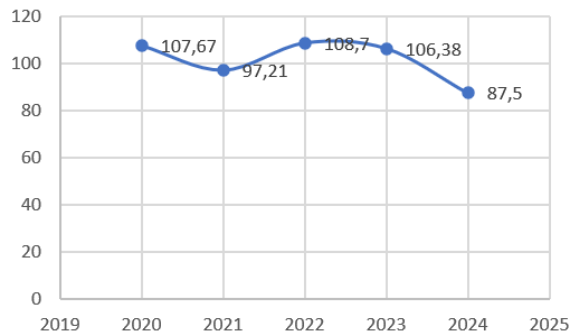
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 1 tersebut yaitu:

- 1) Evaluasi penandaan sampel yang dilakukan mengikuti petunjuk teknis evaluasi penandaan sampel;
- 2) Peningkatan kompetensi petugas sampling;
- 3) Melakukan pelaporan hasil sampling melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- 4) Melakukan koordinasi dengan balai penguji sesuai dengan regionalisasi terkait dengan pelaksanaan pengujian hasil sampling yang dilakukan oleh Loka POM di kabupaten mimika;
- 5) Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling secara berkala;
- 6) Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar membuat produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

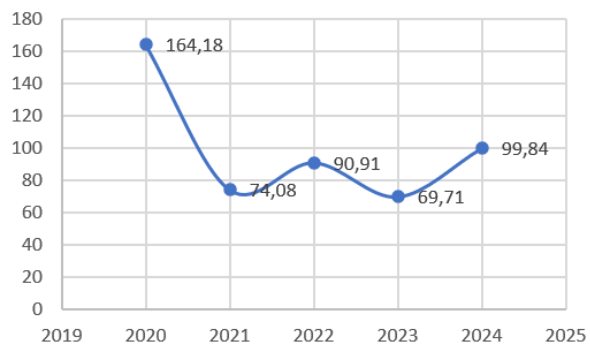
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Mimika mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

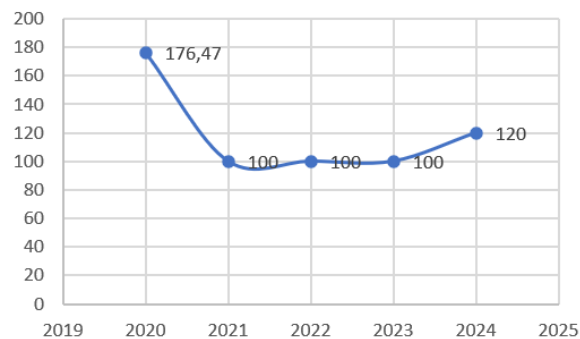
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;



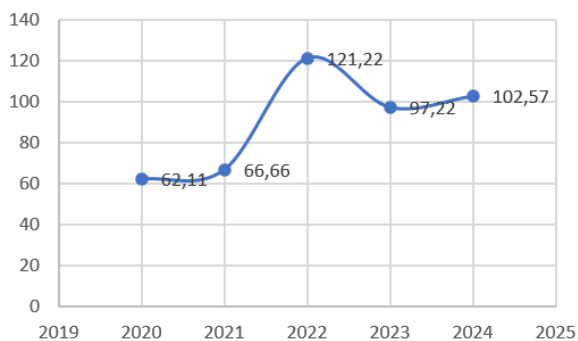
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;



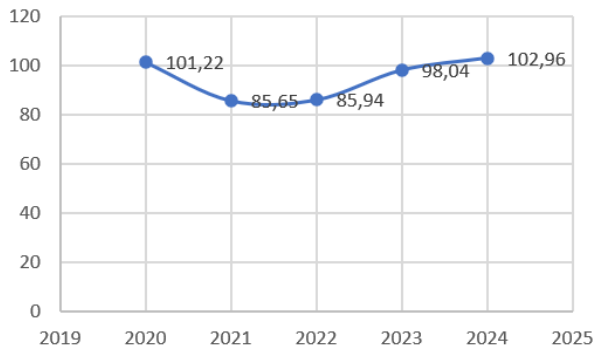
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;



- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;

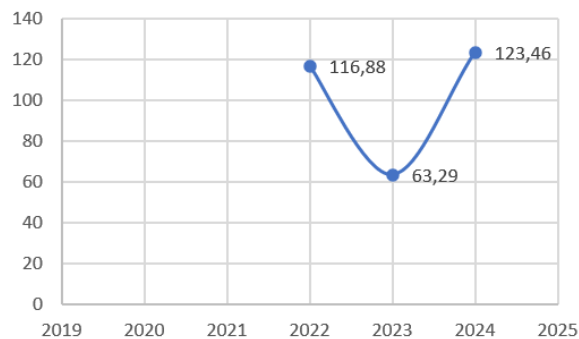


e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;



f. Persentase Keterlibatan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota;

g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 2 yaitu:

- 1) Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan;
- 3) Komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam memberikan respon secara berkala;
- 4) Melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan rumah tangga (PIRT);
- 5) Melakukan Pendampingan secara intens kepada pelaku usaha selama proses sertifikasi;
- 6) Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi sebelum pengajuan permohonan;
- 7) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala;
- 8) Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unit pelayanan publik seperti publikasi berbagai layanan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika melalui media sosial, fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas

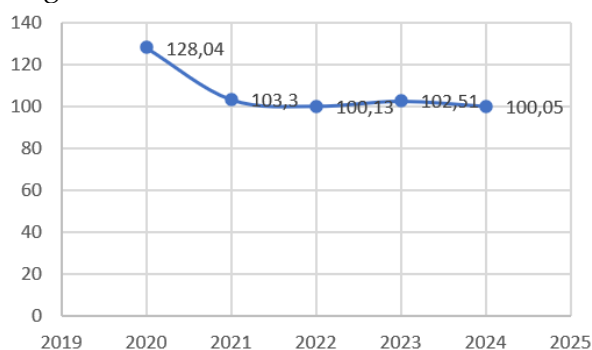
pelayanan;

- 9) Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan DAK non Fisik.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan berbagai upaya pengawasan obat dan makanan untuk memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 3 yaitu:

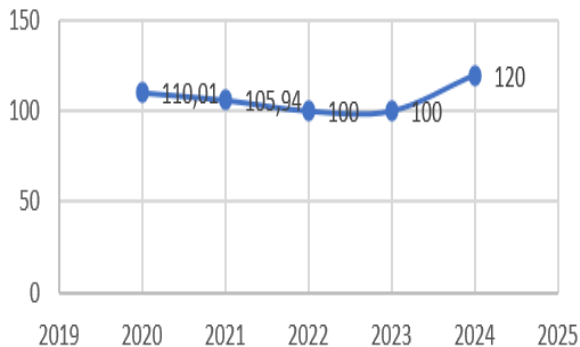
- 1) Pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik sebagai salah satu sarana pengenalan Loka POM di Kabupaten Mimika kepada masyarakat luas;
- 2) Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti antara lain workshop informasi dan komunikasi dan pelatihan teknis KIE;
- 3) Melakukan kegiatan KIE dengan memberikan materi yang menarik dan mudah dipahami dan dibutuhkan masyarakat melalui berbagai platform yang umum dikenal masyarakat seperti media sosial dan melalui videotron;
- 4) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mendukung program nasional.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

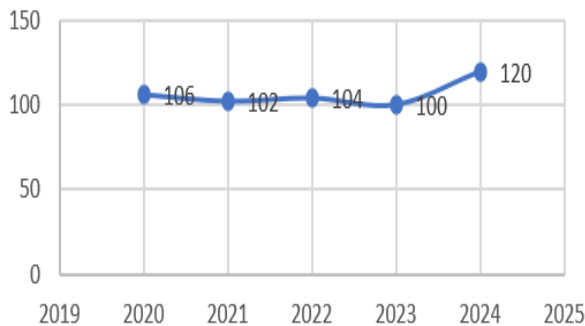
Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, Obat bahan alam, kosmetik,

suplemen kesehatan dan obat kuasi. Adapun sampel yang yang diperiksa yaitu sampel Obat dan Makanan yang merupakan sampel rutin Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;



- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 4 yaitu:

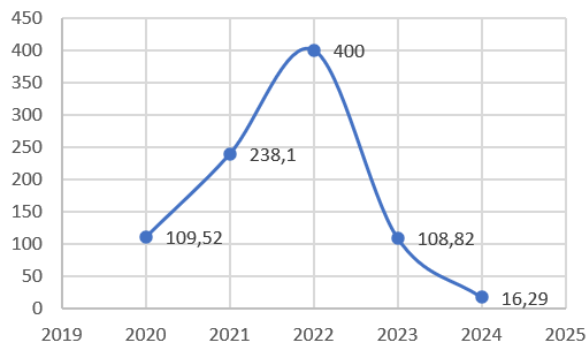
- 1) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling jika ada sampel tidak ditemukan di sarana pada saat melakukan sampling;
- 2) Melakukan koordinasi dengan laboratoorium penguji terkait kecukupan jumlah dan jenis sampel yang disampling;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sampel;
- 4) Melakukan peningkatan terhadap kompetensi petugas.

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan

menggunakan modus-modus baru yang mampu menysar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



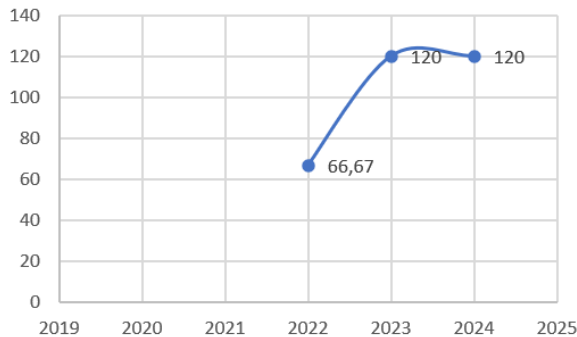
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 5 yaitu :

- 1) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM;
- 2) Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan Obat dan Makanan;
- 3) Peningkatan koordinasi kegiatan penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/Jaksa dalam rangka penyelesaian perkara;
- 4) Penambahan jumlah PPNS dengan mengikuti diklat Pembentukan PPNS;
- 5) Peningkatan kompetensi PPNS dan Petugas intelijen (Petugas fungsi penindakan) dengan mengikuti kegiatan bimtek/pelatihan.

6. Sasaran Kegiatan 6: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 6 yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan SDM pranata komputer yang belum tersedia;
- 2) Penambahan sarana dan prasarana TIK yang belum memadai;
- 3) Peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana;
- 4) Melakukan monitoring evaluasi sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani;
- 5) Penggunaan email corporate dan upload berita-berita aktual secara konsisten serta pemeliharaan sarana dan prasarana IT;
- 6) Meningkatkan kapasitas Alat Pengolah Data.

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Mimika

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 7 yaitu :

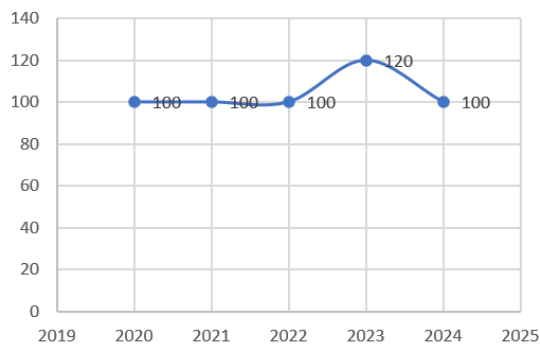
- 1) Meningkatkan kompetensi petugas terkait materi bimbingan dan pembinaan yang diberikan;
- 2) Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha;
- 3) Feedback yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha;
- 4) Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan subsite secara rutin;

- 5) Meningkatkan jumlah dan kualitas konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan;
- 6) Menambah ragam publikasi melalui media elektronik lainnya (videotron, talk show radio/televisi);
- 7) Memberikan Sosialisasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan secara berkala, baik di area-area publik ataupun melalui media sosial dan subsite Loka POM di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan layanan publik;
- 8) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika.

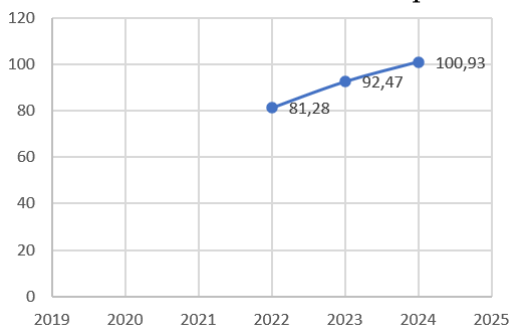
8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Mimika, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

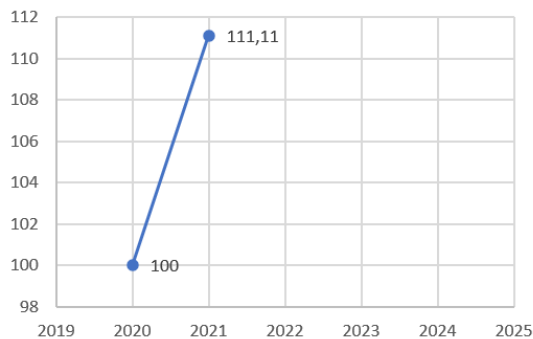
- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika;



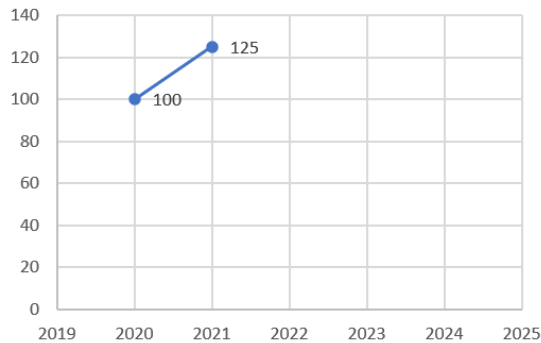
- b. Nilai Pengelolaan Kearsipan;
- c. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Mimika.



d. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu



e. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 8 yaitu:

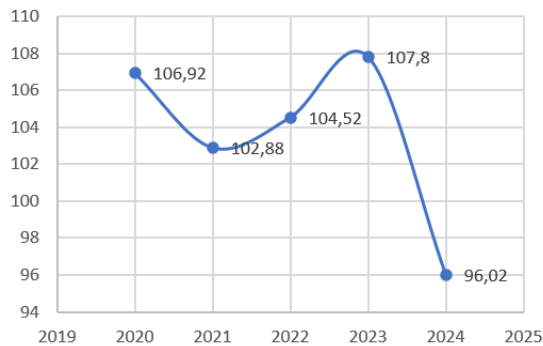
- 1) Membuat inovasi-inovasi sebagai sarana implementasi aksi Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun menjawab kebutuhan masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan implementasi rencana aksi RB sesuai dengan rencana dan melakukan monev rencana aksi RB secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monev;
- 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Inspektorat Utama;
- 4) Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan;
- 5) Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas dan juga SDM pengelola kearsipan;
- 6) Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan.

9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan

profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Mimika



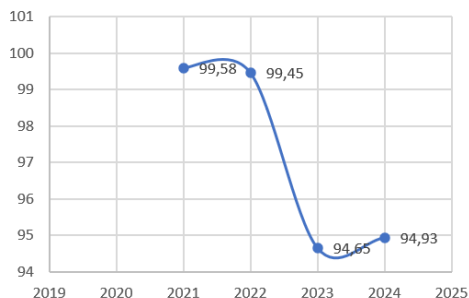
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 9 yaitu :

- 1) Melaksanakan pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan workshop/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM;
- 2) Melakukan penilaian Sasaran Kinerja Program secara berkala dan tepat waktu;
- 3) Melakukan upaya pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan/analisis beban kerja (ABK);
- 4) Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM.

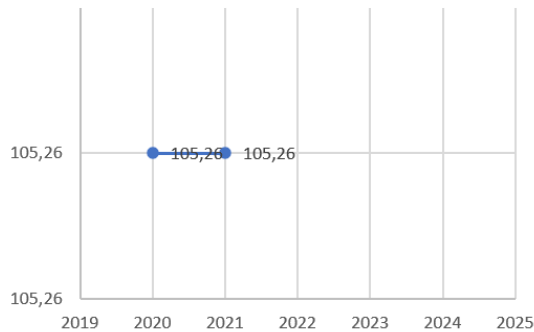
10. Sasaran Kegiatan 10: Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- b. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- c. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri
- d. Nilai Kinerja Anggaran UPT



e. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 10 yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan penarikan dana sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dengan efektif dan efisien;
- 3) Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat;
- 4) Melakukan pengelolaan BMN secara tepat sesuai dengan ketentuan, dengan upaya peningkatan kompetensi SDM dan Sistem Pengelolaan BMN;
- 5) Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
- 6) Melakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan pengelolaan pengadaan barang jasa secara tepat waktu dan akurat.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Loka POM di Kabupaten Mimika memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari stakeholder dan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tetapi juga memungkinkan Loka POM di Kabupaten Mimika untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi dari berbagai pihak, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan strategis, termasuk peran Loka POM di Kabupaten Mimika untuk ikut serta mengawal program makan bergizi gratis (MBG), menangani isu-isu keamanan pangan olahan dan sediaan farmasi, mengawasi peredaran obat-obatan, dan

memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Mimika menjaring umpan balik dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di 8 Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan aspirasi berbagai pihak terhadap perubahan lingkungan strategis, Loka POM di Kabupaten Mimika ikut serta berperan dalam menanggapi isu-isu yang berkembang terkait obat dan makanan, perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis yang dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika senantiasa menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika 2025- 2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara umum dan aspirasi masyarakat Provinsi Papua Tengah secara khusus.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki potensi dan permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) 2025-2029. Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik.

Menyusun strategi pengawasan obat dan makanan yang efektif memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Dengan mengenali potensi, Loka POM di Kabupaten Mimika bisa memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Disisi lain, dengan memahami permasalahan, strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran untuk menghadapi hambatan yang ada. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman

kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

Menyusun strategi pengawasan obat dan makanan yang efektif memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Di sisi lain, dengan memahami permasalahan, strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Mimika menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Mimika, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika, dapat membantu memahami dan

mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Mimika di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Mimika, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Mimika telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Loka POM di Kabupaten Mimika mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Mimika berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci dalam membangun dan mengarahkan kinerja organisasi, termasuk di Loka POM di Kabupaten Mimika. Komitmen ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, terutama dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas di wilayah catchment area. Beberapa komitmen pimpinan bisa menjadi kekuatan kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika seperti; mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan obat dan makanan; meningkatkan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan. Pimpinan juga memberikan penghargaan atas kinerja yang baik; meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap peredaran obat dan makanan sehingga Loka POM di Kabupaten Mimika bisa menjadi lebih proaktif dan efisien dalam mendeteksi dan menanggulangi produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Juga memperkuat hubungan dengan Stakeholders seperti BPOM Pusat, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, TNI/Polri, Kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya termasuk dengan pelaku usaha untuk memperlancar alur koordinasi dalam menangani masalah yang berkaitan dengan obat dan makanan. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat dalam menjaga

kualitas produk yang beredar di pasar ; Penggunaan teknologi dan sistem informasi dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Loka POM di Kabupaten Mimika sehingga mempermudah proses manajemen, pengawasan obat dan makanan. Program- program edukasi, seperti penyuluhan dan kampanye tentang bahaya obat dan makanan, akan semakin memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Loka POM di Kabupaten Mimika tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Mimika telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan.

2. Tersedianya regulasi yang mendukung tupoksi

Regulasi menjadi kekuatan utama bagi BPOM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) karena memberikan dasar hukum, panduan teknis, dan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan secara efektif. Regulasi memberikan legitimasi bagi BPOM untuk bertindak sesuai kewenangannya. Dengan dasar hukum yang kuat, BPOM dapat membuat peraturan turunan dari undang-undang yang relevan, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjalankan pengawasan dengan payung hukum yang melindungi tindakan BPOM, seperti inspeksi, pengujian produk, atau penegakan sanksi. Regulasi memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan pengawasan pre dan post market, antara lain: melakukan inspeksi fasilitas sarana produksi guna memastikan proses produksi sesuai standar, penarikan produk jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, penegakan hukum. Regulasi mendukung Loka POM di Kabupaten Mimika dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui kewajiban pelabelan yang informatif, seperti daftar komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya. Selain itu, Program edukasi yang didukung peraturan, seperti kampanye "Cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa). Regulasi menjadi kekuatan Loka POM di Kabupaten Mimika dengan memberikan landasan hukum, pedoman operasional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Tanpa regulasi, Loka POM di Kabupaten Mimika tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara efektif, baik dalam memastikan keamanan produk, menjaga mutu, maupun melindungi masyarakat dari

risiko kesehatan. Regulasi yang jelas dan adaptif juga membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika

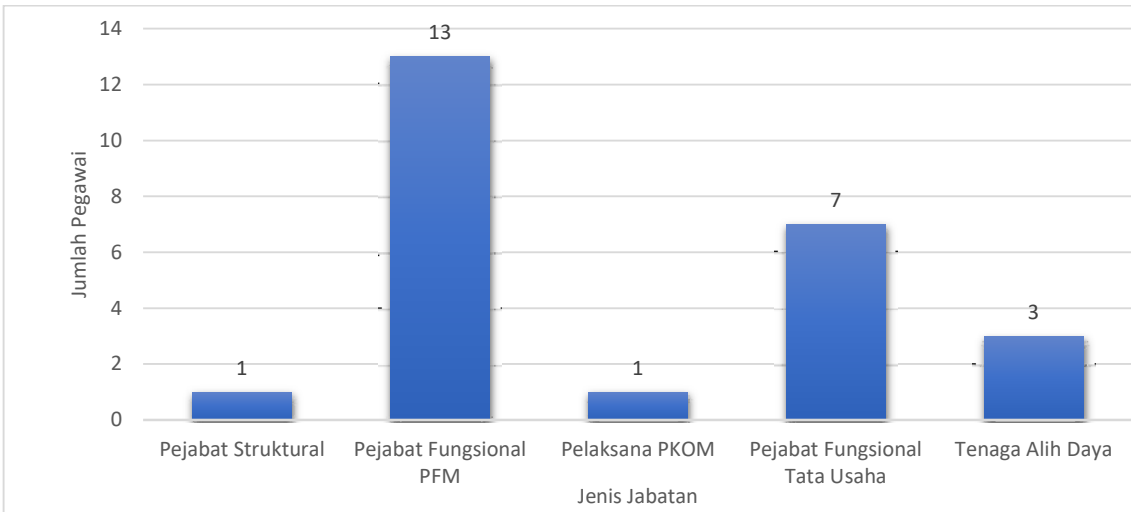
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang andal

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor kunci keberhasilan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berdedikasi menjadi kekuatan utama bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Tabel 1.3 Data Kompetensi

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai
D3	4 Orang
S1	19 Orang
Apoteker	7 Orang
S2	2 Orang

Loka POM di Kabupaten Mimika didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan bulan Juni tahun 2025 berjumlah 22 orang ASN (PNS 21 orang, PPPK 1 orang) dan 3 orang tenaga alih daya. Dengan rincian 1 Pegawai Pejabat struktural, 13 Pegawai Fungsional PFM, 1 Pegawai Pelaksana PKOM, 7 Pegawai Fungsional Tata Usaha, 3 Pegawai Alih Daya.



Gambar 1.4 Grafik Kepegawaian

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Mimika
Per Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8
4	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Perencana Ahli Pertama	1
8	Pranata Komputer	1
9	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
10	Penata Laksana Barang Terampil	1
11	Tenaga Alih Daya	3

Loka POM di Kabupaten Mimika mempunyai strategi manajemen SDM yang komprehensif untuk menutup gap ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Loka POM di Kabupaten Mimika mengoptimalkan SDM dengan memberdayakan setiap pegawai sesuai dengan keahlian terbaik mereka, Kolaborasi Tim yang Kuat, pelatihan dan pengembangan kompetensi atau mentoring internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai, ketersediaan dan penggunaan alat dan teknologi yang dapat membantu tugas-tugas rutin dan mengurangi pekerjaan secara manual sehingga efektif dan efisien, serta fokus prioritas utama yang memberikan dampak besar. Terdapat kebijakan pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang harus dilakukan secara terarah, adil, transparan

dan konsisten yang bertujuan untuk mengoptimalkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan dilakukan untuk menjamin Peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Peningkatan pengembangan kompetensi SDM terus dilakukan, dalam bentuk keikutsertaan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, bimtek, dan workshop yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Loka POM di Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk peningkatan kualifikasi pendidikan melalui program Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, SDM Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan obat dan makanan.

4. Sistem Pelayanan Publik yang memadai

Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan kekuatan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Mimika. Ditunjang oleh keberadaan petugas layanan yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan efisien. Selain itu, sistem digitalisasi layanan (SIPT, e-registrasi) juga menjadi nilai tambah yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.

Selain kompetensi SDM dan penggunaan teknologi, Unit Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui program pelatihan staf dan evaluasi layanan melalui berbagai tools antara lain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan *Self Assessment* Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Disamping itu penyusunan Standar Pelayanan berbasis partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) memastikan bahwa kebijakan dan program pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat/pengguna layanan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implementasi Inovasi

Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu kekuatan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Dengan pemanfaatan TI yang efektif, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat meningkatkan

efisiensi, akurasi, dan jangkauan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk terkait lainnya. Teknologi informasi memungkinkan Loka POM di Kabupaten Mimika menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan produk, seperti e-registration: Sistem online yang memudahkan pelaku usaha mengajukan izin edar tanpa harus datang langsung ke kantor Loka POM di Kabupaten Mimika; Digitalisasi dokumen: Memastikan data perizinan tersimpan dengan aman dan mudah diakses; Pemantauan real-time: Dengan sistem ini, Loka POM di Kabupaten Mimika mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Memantau mutu produk dengan metode analisis berbasis perangkat lunak. Berbagi hasil pengujian secara cepat melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) antara laboratorium penguji dan Loka POM di Kabupaten Mimika melalui jaringan TI. Hal ini meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam memastikan keamanan dan mutu produk.

Teknologi Informasi memperkuat Loka POM di Kabupaten Mimika dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui Subsite resmi yaitu <https://mimika.pom.go.id> sebagai sumber informasi tentang regulasi, daftar produk terdaftar, dan temuan kasus pelanggaran. Aplikasi mobile bpom mobile untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, seperti memeriksa legalitas produk atau melaporkan produk ilegal. Media sosial facebook dengan nama akun Bpom Mimika, instagram @bpom.mimika, tiktok @ Bpom Mimika, youtube BPOM di Mimika sebagai platform untuk menyebarkan edukasi tentang keamanan obat dan makanan secara luas dan cepat.

Teknologi informasi adalah kekuatan strategis BPOM yang memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan. Dengan pemanfaatan TI yang optimal, BPOM dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang terkait dengan obat, makanan, dan produk lainnya. Investasi berkelanjutan dalam TI akan memastikan BPOM tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global.

6. Sistem Pengawasan Yang Telah Memadai

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang terkait dengan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu UPT BPOM melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Tengah, melakukan pengawasan sebelum dan selama produk obat dan makanan beredar untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan produk obat dan makanan yang

diproduksi atau dihasilkan aman, berkhasiat dan bermutu hingga di tangan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman. Loka POM di Kabupaten Mimika juga menerapkan sistem 3 pilar pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan peran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat serta kolaborasi pentahelix dalam pengawasan obat dan makanan, berkolaborasi dengan lembaga, kementerian, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat, untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Tengah.



Gambar 1.5 Diagram Pentahelix (Sumber BPOM Bogor)

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Selain memahami kekuatan organisasi, analisis terhadap kondisi internal juga perlu mencakup identifikasi kelemahan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Pengungkapan kelemahan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai keterbatasan, tantangan, atau aspek yang belum optimal dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Pemahaman yang jelas terhadap kelemahan menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas perbaikan, meningkatkan kinerja, serta meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan program kerja ke depan. Berikut ini adalah kelemahan yang perlu menjadi perhatian:

1. Keterbatasan Jumlah SDM

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Mimika berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, Loka POM di Kabupaten Mimika dengan catchment area di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah terdapat 8 Kabupaten/Kota, dengan jumlah 131 distrik, dengan cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas termasuk daerah pesisir, pegunungan, pulau dengan jumlah SDM belum mampu menjangkau wilayah tersebut, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan optimal. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Luasnya cakupan wilayah ini menuntut kapasitas operasional yang besar dan penugasan lapangan yang intensif, sementara ketersediaan SDM masih terbatas untuk menjangkau seluruh area secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum berjalan maksimal dan meningkatkan risiko penundaan inspeksi, sehingga produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu berpotensi beredar lebih lama di masyarakat.

Keterbatasan dalam jumlah SDM membatasi kapasitas Loka POM di Kabupaten Mimika untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam

mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Tabel 1.5 Perencanaan SDM 2025-2029

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	SDM Yang Direncanakan			
					2026	2027	2028	2029
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika	1	1	0				
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0				
3	Arsiparis Mahir	1	0	1				
4	Arsiparis Terampil	1	0	1	CASN : 1 Pegawai			
5	Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0				
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	5	0				
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	8	5	CASN : 3 Pegawai	CASN : 1 Pegawai	PJ	
8	Perencana Ahli Muda	1	0	1				KJJ
9	Perencana Ahli Pertama	1	1	0				
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1	KJJ			
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0				
12	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	CASN : 1 Pegawai			
13	Pranata Komputer Terampil	1	1	0				
14	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1				KJJ
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0				
16	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1				
TOTAL		31	22	10	6	1	1	2

2. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal

Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sinergi antara Loka POM di Kabupaten Mimika dan BPOM sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Namun hal ini belum berjalan secara optimal antara

lain koordinasi yang kurang efektif dimana kurangnya koordinasi antara Loka POM di Kabupaten Mimika dan BPOM dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pusat sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang ada di Papua Tengah. Selain itu, kendala geografis dimana lokasi geografis Papua Tengah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan inovatif. Komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah menyebabkan keputusan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu relevan atau implementatif di tingkat daerah. Hal ini memperburuk pengawasan produk obat dan makanan, karena Loka POM di Kabupaten Mimika sering kali harus menyesuaikan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketergantungan pada Instruksi Pusat sehingga Loka POM di Kabupaten Mimika sering kali tergantung pada instruksi dan arahan dari pusat untuk menentukan langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas dan inisiatif di tingkat daerah dalam merespons permasalahan yang berkembang dengan cepat. Di daerah seperti Papua Tengah, dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas maka pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif sangat dibutuhkan. Ketika pengawasan harus menunggu arahan dari pusat, hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah yang ada di lapangan.

Kurangnya pemahaman dan sensitivitas atas kondisi lokal di Papua Tengah sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Kantor Pusat BPOM yang berlokasi di Jakarta, sering kali tidak sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika terkait dengan geografis, sosial, dan ekonomi. Misalnya, ketergantungan pada sistem distribusi yang terpusat dan kurangnya akses ke daerah-daerah terpencil membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Seharusnya, sinergisme antara pusat dan daerah dapat dibangun dengan lebih memperhatikan dinamika lokal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif di tingkat lapangan. Secara keseluruhan, kurangnya sinergisme yang efektif antara pusat dan Loka POM di Kabupaten Mimika telah menciptakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ketergantungan yang tinggi pada arahan pusat, koordinasi yang kurang, dan ketidakcocokan antara kebijakan pusat dan kondisi lokal di Papua Tengah menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara BPOM pusat dan daerah, dengan menyesuaikan kebijakan, mempercepat aliran informasi, serta menyediakan dukungan sumber daya yang lebih memadai bagi Loka POM di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, pengawasan

terhadap obat dan makanan di Papua Tengah dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal

Kekurangan atau kelemahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal dapat menjadi hambatan signifikan bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterbatasan perangkat keras seperti komputer/laptop, server, atau jaringan yang tidak memadai. Koneksi internet yang lambat atau tidak tersedia di beberapa tempat/ruangan mengganggu komunikasi dan akses data. Sistem Informasi yang tidak terintegrasi, dimana data yang tersebar di berbagai sistem tanpa integrasi menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi informasi. Sulitnya berbagi data antar unit atau antara pusat dan daerah memperlambat pengambilan keputusan.

Minimnya SDM yang kompeten di Bidang TIK atau kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Keamanan data yang lemah, dimana sistem keamanan yang belum memadai meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Tidak adanya protokol atau standar keamanan yang jelas, seperti enkripsi data atau cadangan data.

Terbatasnya anggaran pengembangan TIK menyebabkan kesulitan dalam pengadaan perangkat baru, pembaruan sistem, atau pelatihan SDM. Kurangnya prioritas untuk alokasi dana bagi TIK dan sarana prasarana. Dampak kelemahan ini efisiensi pengawasan obat dan makanan kerja menurun, bisnis proses kerja menjadi lambat dan tidak produktif, gangguan komunikasi, hambatan dalam koordinasi antar unit atau dengan pihak eksternal/Stakeholders. Layanan kepada masyarakat atau pengguna menjadi tidak maksimal. Kehilangan daya saing disebabkan oleh Organisasi tertinggal dalam adopsi teknologi dibandingkan kompetitor.

4. Keterbatasan Kapasitas Laboratorium

Loka POM di Kabupaten Mimika telah memiliki fasilitas laboratorium, namun kapasitasnya masih terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pengujian sederhana. Laboratorium tersebut belum mampu mendukung pengujian komprehensif terhadap seluruh parameter mutu dan keamanan produk obat dan makanan.

Akibat keterbatasan ini, pengujian lanjutan masih bergantung pada laboratorium di luar daerah, yang memerlukan waktu, biaya, serta proses logistik tambahan. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam proses analisis, tindak lanjut pengawasan,

serta penegakan hukum terhadap produk yang terindikasi tidak memenuhi ketentuan.

Kondisi ini juga menghambat deteksi dini terhadap produk berisiko tinggi, terutama yang beredar di wilayah terpencil dan sulit diakses, serta mengurangi efektivitas pengawasan berbasis risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas laboratorium secara bertahap untuk menunjang kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengawasan.

5. Kelembagaan yang belum memadai

Loka POM di Kabupaten Mimika saat ini merupakan satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) Badan POM yang melayani seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. Wilayah ini sangat luas dan memiliki kondisi geografis yang menantang, namun kapasitas kelembagaan Loka POM masih terbatas—baik dari sisi struktur organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana.

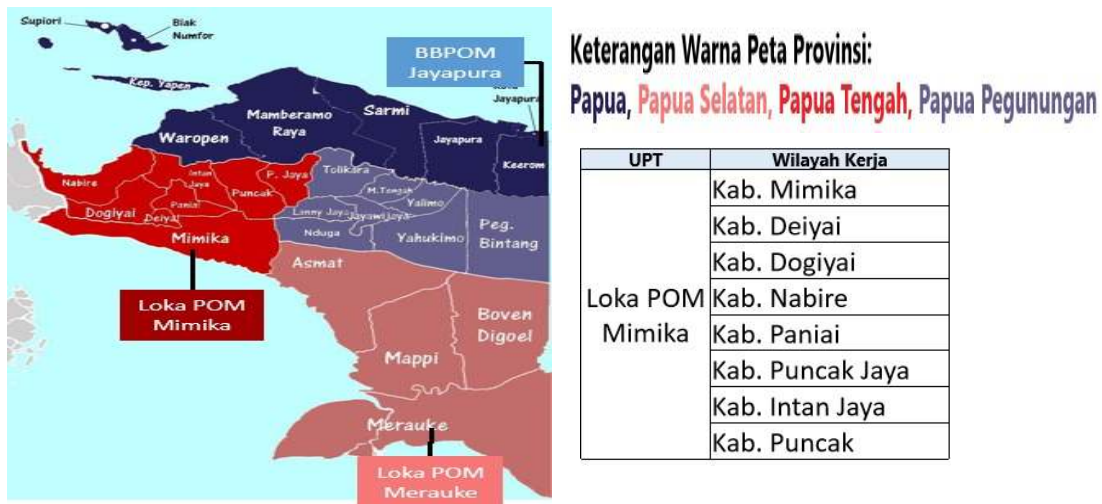
Kelembagaan Loka POM Mimika belum memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengemban tugas besar pengawasan obat dan makanan di tingkat provinsi. Jabatan struktural dan fungsionalnya terbatas, sehingga menyulitkan dalam pembagian tugas, koordinasi, dan pelaksanaan program pengawasan yang kompleks di lapangan.

Ketersediaan pegawai di Loka POM Mimika masih jauh dari ideal, terutama untuk posisi-posisi teknis seperti pengawas farmasi dan makanan, analis laboratorium, dan petugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). SDM yang ada harus bekerja secara multitugas dan rentan terhadap kelelahan, yang bisa menurunkan efektivitas pengawasan.

Papua Tengah terdiri dari banyak kabupaten dengan medan geografis sulit, namun Loka POM hanya berada di Mimika tanpa ada kantor cabang atau pos pengawasan di wilayah lain. Hal ini membuat kegiatan pengawasan langsung, edukasi masyarakat, dan penanganan laporan dari masyarakat menjadi sangat terbatas jangkauannya.

Kapasitas kelembagaan yang belum memadai memengaruhi kemampuan Loka POM dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan mitra strategis lainnya di wilayah-wilayah kabupaten di Papua Tengah. Akibatnya, pelaksanaan program nasional seperti pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pengawasan obat tradisional ilegal, dan pemberdayaan UMKM menjadi kurang maksimal.

Gambar 1.6 Peta Daerah Pengawasan Loka POM di Kab. Mimika



1.2.3 Peluang (Opportunity)

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Berikut ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika:

1. Tuntutan/Ekspektasi yang tinggi Stakeholder terhadap kinerja BPOM

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Papua Tengah. Seiring dengan perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika perdagangan di kawasan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin besar dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai dengan standar. Harapan besar dari Stakeholder dalam hal ini lintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan merespons tuntutan tersebut secara strategis, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam pengawasan. Papua Tengah adalah wilayah yang luas dan memiliki tantangan geografis, dengan banyak daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Loka POM di Kabupaten Mimika dengan berbagai Instansi dan

pihak terkait (*stakeholder*). Stakeholder, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga industri, sering menuntut kinerja yang cepat dan efisien untuk mengatasi tantangan ini. Dengan semakin banyaknya produk yang masuk dari luar daerah, tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika adalah memastikan produk yang sampai di Papua Tengah aman untuk dikonsumsi. Masyarakat dan Stakeholder lainnya, seperti pemerintah daerah dan industri kesehatan, tentu menuntut adanya pengawasan yang ketat terkait kualitas dan keamanannya. Stakeholder juga menuntut agar Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai instansi yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman. Edukasi ini sangat krusial mengingat banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar yang beredar di pasar. Pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, dalam rangka menciptakan ekosistem yang aman dan sehat terkait dengan obat dan makanan.

2. Dukungan Stakeholder dan Supra Sistem

Pemerintah pusat melalui Badan POM (BPOM) memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan, anggaran, serta pengawasan terhadap kinerja UPT di seluruh Indonesia. Beberapa bentuk dukungan dari suprasistem ini, antara lain penguatan regulasi dan kebijakan, penyediaan sumber daya, sinergi program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika. Beberapa bentuk dukungan dari pemerintah daerah antara lain koordinasi dalam pengawasan obat dan makanan termasuk memfasilitasi akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini sangat penting mengingat wilayah Papua Tengah yang memiliki topografi yang beragam dan memerlukan pendekatan khusus. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi (penyediaan data dan informasi lokal) terkait masalah kesehatan lokal, isu peredaran obat terlarang, atau produk pangan yang berisiko, sehingga Loka POM di Kabupaten Mimika dapat merancang pengawasan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi spesifik wilayah.

Dukungan dari masyarakat sangat penting, baik dalam hal partisipasi aktif dalam melaporkan temuan produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar maupun dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya obat atau makanan ilegal dapat melaporkan temuan mereka kepada Loka POM di Kabupaten Mimika. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya peran Loka POM di Kabupaten Mimika dalam pengawasan

produk juga membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Keberhasilan Loka POM di Kabupaten Mimika juga tergantung pada seberapa besar dukungan masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman serta cara melaporkan produk yang mencurigakan.

Pada sektor swasta, terutama industri makanan dan farmasi memainkan peran yang signifikan dalam mendukung tugas Loka POM di Kabupaten Mimika. Dukungan yang dapat diberikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi yaitu perusahaan-perusahaan di sektor obat dan makanan harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan pelabelan produk. Kepatuhan ini mempermudah tugas Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melakukan pengawasan. Pada lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan edukasi terkait obat dan makanan.

Pada media massa, baik cetak maupun digital memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait dengan keamanan obat dan makanan. Dukungan yang diberikan antara lain edukasi publik membantu memperluas jangkauan informasi terkait bahaya obat atau makanan ilegal dan pentingnya pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Selain itu, media juga bisa berperan dalam memberikan sorotan terhadap temuan-temuan produk yang tidak aman, sehingga mendorong tindakan yang lebih cepat dan tepat dari Loka POM di Kabupaten Mimika.

Secara keseluruhan, dukungan yang diberikan oleh Stakeholder dan suprasistem sangat krusial untuk memperkuat kapasitas Loka POM Mimika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat pentingnya pengawasan produk obat dan makanan untuk kesehatan masyarakat, khususnya di Papua Tengah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik

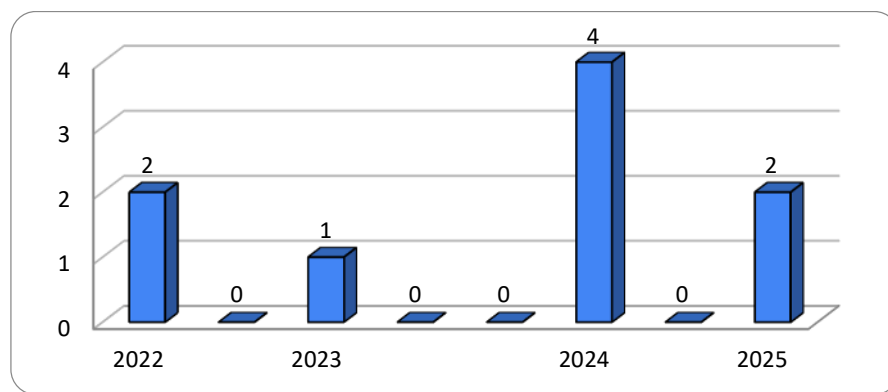
3. Kerjasama Yang Baik Dengan Stakeholder

Kerjasama yang baik dengan Stakeholder terkait sangat diperlukan dalam melakukan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika antara lain pengawasan pelaksanaan KIE menjadi peluang besar bagi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi. Kerjasama ini memungkinkan terlaksananya kegiatan berjalan lancar bahkan mampu mengembangkan program-program kolaboratif yang inovatif (KIE oleh talent lokal/Kader Keamanan Pangan) dan pelaksanaan kampanye edukasi tentang keamanan Obat dan Makanan secara lebih masif. Dengan pendekatan ini, Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya

memastikan produk yang beredar sesuai standar, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis

4. Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi di Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Mimika, memberikan berbagai peluang bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, dan banyak di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik, yang semuanya menjadi tanggung jawab pengawasan BPOM.



Gambar 1.7 Overview Pendampingan UMKM Loka POM Mimika 2022 - 2025

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi dapat menjadi peluang bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika dalam hal:

- Memastikan Legalitas dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Melalui Pendampingan dan Pembinaan.

Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sosialisasi dan bimtek, pendampingan teknis dan coaching clinic. Materi sosialisasi berupa regulasi terkait standar keamanan dan mutu produk serta tata cara sertifikasi dan registrasi produk, adapun materi bimtek lebih mengarah pada materi-materi teknis yang terkait dengan cara produksi yang baik. Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan nantinya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait regulasi yang berlaku dan aspek-aspek yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman.

Pendampingan teknis berupa pendampingan secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM dalam hal pemenuhan persyaratan - persyaratan yang

diperlukan dalam proses sertifikasi sarana produksi maupun registrasi produk. Pendampingan teknis ini dilakukan untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh UMKM melalui sosialisasi dan bimtek diterapkan dengan benar oleh UMKM dalam praktek proses produksinya sehingga dihasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

b. Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pesatnya pertumbuhan UMKM tidak hanya memunculkan pelaku usaha baru tetapi juga menghadirkan potensi - potensi produk unggulan lokal PapuaTengah yang belum banyak disentuh. Diantara produk unggulan lokal Papua Tengah adalah sagu dan produk turunannya, minyak buah merah, produk olahan ikan, kopi, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika produk-produk UMKM termasuk produk unggulan lokal Papua Tengah akan memiliki daya saing yang meningkat di pasaran tidak hanya di pasar lokal Papua Tengah tetapi juga dapat merambah ke pasar Nasional bahkan Internasional. Hal ini bukanlah hal yang mustahil dengan produk yang sudah terjamin mutu dan keamanannya yang dibuktikan dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit melalui serangkaian proses sertifikasi dan registrasi dengan melibatkan tahapan evaluasi dan verifikasi yang ketat akan meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk berani bersaing di pasaran. Disisi lain konsumen akan lebih mempercayai produk yang telah memiliki izin edar yang sudah bisa dipastikan jaminan mutu dan keamanannya.

Meningkatnya daya saing produk UMKM di pasaran secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Produk yang memiliki daya saing di pasaran dan diminati oleh konsumen akan meningkatkan perekonomian UMKM itu sendiri, bukan hanya UMKM yang meningkat perekonomiannya tetapi juga karyawan dari UMKM tersebut, pemasok bahan baku, dan setiap unsur yang terlibat baik pada rantai produksi maupun rantai distribusi dari produk UMKM tersebut serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Mengurangi Peredaran Produk Ilegal dan Berbahaya

Pertumbuhan UMKM yang pesat juga meningkatkan potensi munculnya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan UMKM terkait regulasi dibidang keamanan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk dari UMKM memenuhi standar mutu dan keamanan serta terdaftar secara sah. Pengawasan dilakukan terhadap peredaran produk di pasaran. Terhadap produk yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu

dan keamanan atau tidak terdaftar dilakukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang memproduksi produk tersebut untuk memperbaiki mutu dan keamanan produknya dan melakukan proses registrasi produknya agar produknya memiliki legalitas untuk dapat beredar di pasaran.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi memberikan banyak peluang bagi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk lokal. Melalui pembinaan, pendampingan, kolaborasi, dan pengawasan yang lebih baik, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat memastikan bahwa produk UMKM yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada saat yang sama, Loka POM di Kabupaten Mimika juga dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM, membuka pasar lebih luas, dan memperkuat perekonomian lokal dengan produk-produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya.

5. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi menjadi suatu peluang besar dalam meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika, terutama dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah Papua Tengah. Teknologi modern memungkinkan untuk lebih efisien, efektif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik dari segi kualitas pengawasan, kecepatan, maupun jangkauan daerah yang sulit dijangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi berbagai sektor, termasuk pengawasan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika, yang memiliki tantangan geografis dan operasional yang cukup signifikan, kini berada pada titik di mana pemanfaatan teknologi dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan kinerjanya. Teknologi tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses kepada berbagai sumber daya dan informasi yang dapat memperkuat kualitas pengawasan produk di wilayah ini.

Perkembangan teknologi menjadi peluang besar dalam meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Tengah. Teknologi modern memungkinkan proses kerja dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan akurat, sekaligus memperluas jangkauan pengawasan pada daerah yang sulit diakses. Pemanfaatan teknologi mencakup penguatan sistem digital pengawasan seperti e-registration, e-sertifikasi, dan aplikasi pelaporan masyarakat; optimalisasi media digital untuk KIE dan edukasi publik; serta peningkatan kapasitas laboratorium melalui peralatan analisis modern dan sistem manajemen data yang terintegrasi.

Perkembangan teknologi memberi peluang besar bagi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, sistem pelaporan berbasis mobile, serta platform edukasi yang lebih luas, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi untuk kolaborasi antar Stakeholder dan penegakan hukum, pengawasan terhadap obat dan makanan di Papua Tengah dapat menjadi lebih transparan, terpercaya, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Semua ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua Tengah dengan memastikan mereka mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

6. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Momentum Strategis untuk Penguatan Peran dan Kelembagaan: Dengan dibentuknya Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki peluang besar untuk memperkuat eksistensinya sebagai perpanjangan tangan BPOM RI di wilayah provinsi yang baru. DOB memberikan ruang bagi penataan ulang fungsi-fungsi kelembagaan di daerah, termasuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Potensi Peningkatan Status Kelembagaan: Sebagai satu-satunya UPT BPOM yang sudah hadir di wilayah Provinsi Papua Tengah, Loka POM Mimika memiliki peluang kuat untuk didorong naik kelas menjadi Balai POM (tipe B atau bahkan A) guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan di tingkat provinsi. Kenaikan status ini akan membuka jalan bagi penambahan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang lebih memadai. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah yang Baru: DOB biasanya membawa semangat pembangunan dan perbaikan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk umumnya lebih terbuka untuk membangun kerja sama dan mendukung program-program pusat, termasuk dukungan terhadap keberadaan dan penguatan Loka POM, baik dari sisi anggaran, lahan, maupun kolaborasi lintas sektor.

Wilayah DOB seringkali mendapatkan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, kelembagaan, dan pelayanan dasar. Ini bisa menjadi peluang bagi Loka POM Mimika untuk mengusulkan pengembangan laboratorium, kendaraan operasional, pos pengawasan lintas kabupaten, dan sistem.

Pembentukan provinsi baru biasanya diikuti oleh percepatan pembangunan dan peningkatan peredaran produk obat, makanan, kosmetik, dan lainnya. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih ketat, sehingga peran BPOM menjadi semakin vital

dalam mendampingi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama untuk menjaga agar produk yang beredar aman dan bermutu.

Loka POM dapat membangun kemitraan strategis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, serta menjalin komunikasi dengan DPRD Provinsi Papua Tengah untuk memperjuangkan regulasi daerah yang mendukung pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan UMKM pangan lokal.

1.2.4 Ancaman (Threat)

Selain peluang, analisis lingkungan eksternal juga mengidentifikasi berbagai ancaman yang dapat memengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Pemahaman terhadap ancaman tersebut penting agar Loka POM di Kabupaten Mimika mampu menyusun langkah antisipatif, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak yang dapat merugikan pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini merupakan ancaman yang dapat memengaruhi Loka POM di Kabupaten Mimika:

1. Perubahan pola konsumsi Masyarakat terkait Obat dan Makanan

Pola hidup masyarakat yang berubah dapat menjadi ancaman bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan konsumsi, gaya hidup, dan preferensi masyarakat yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar. Loka POM di Kabupaten Mimika, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan produk-produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar, menghadapi tantangan jika pola hidup masyarakat tidak mendukung prinsip-prinsip kesehatan.

Gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, atau kebiasaan merokok, dapat meningkatkan ketergantungan pada produk obat-obatan atau suplemen. Masyarakat yang lebih bergantung pada obat-obatan atau suplemen untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih mudah mengonsumsi produk yang tidak terdaftar atau yang tidak sesuai standar.

Perubahan pola hidup yang semakin konsumtif, mencari yang instan, cenderung mengutamakan kenyamanan tanpa memperhatikan aspek keamanan produk dapat mengarah pada konsumsi produk yang berisiko, tidak terdaftar atau ilegal, atau bahkan mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti obat-obatan, suplemen, atau kosmetik yang beredar di pasar tanpa izin dari BPOM.

Loka POM di Kabupaten Mimika perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar dan aman dikonsumsi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan e-commerce, perilaku konsumtif masyarakat semakin tinggi, dan cenderung membeli produk secara daring (online) tanpa memeriksa keabsahan atau keamanannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk mengawasi produk yang beredar, karena sebagian besar transaksi ini tidak melibatkan pemeriksaan fisik.

Pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif, tidak sehat, atau dipengaruhi oleh tren media sosial dapat menjadi ancaman serius bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang lebih cenderung memilih produk berdasarkan kemudahan, harga murah, atau popularitas tanpa memperhatikan standar keamanan dapat memberi peluang bagi peredaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau berbahaya. Loka POM di Kabupaten Mimika harus lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar (terutama yang dijual secara online), serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin dinamis dengan meningkatnya konsumsi Obat dan Makanan instan serta produk-produk dengan bahan tambahan yang tidak terkontrol maupun pangan dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) tinggi menjadi ancaman serius bagi pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh produk kesehatan dan pangan, sering kali tidak menyadari potensi bahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini menambah tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

2. Peningkatan produksi dan distribusi Obat dan Makanan Yang tidak memenuhi ketentuan

Peningkatan produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan standar dapat menjadi ancaman serius bagi Loka POM di Kabupaten Mimika, baik dari segi pengawasan maupun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi dan semakin berkembangnya sektor industri obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam mengawasi dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Peningkatan produksi dan distribusi yang tidak terkelola dengan baik bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Salah satu ancaman peningkatan produksi dan distribusi produk yang beredar adalah meningkatnya kemungkinan produksi dan distribusi obat dan makanan yang belum

terdaftar atau ilegal, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang berasal dari luar Papua Tengah. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melakukan pengawasan karena sulitnya memantau seluruh produk yang beredar, terutama yang diedarkan melalui jalur distribusi yang tidak resmi.

Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, dapat mendorong produsen untuk menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas bahan baku, mengabaikan standar keamanan, atau bahkan menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menarik minat konsumen dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, distribusi obat dan makanan kini tidak hanya terbatas pada sarana distribusi secara fisik, melainkan banyak produk yang kini didistribusikan melalui e-commerce, media sosial, dan jalur distribusi informal lainnya yang sulit diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika.

Wilayah Papua Tengah yang luas dan sulit dijangkau, memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika. Peningkatan distribusi produk, terutama di daerah terpencil, dapat membuat pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

Peningkatan jumlah produk yang beredar, baik yang legal maupun ilegal, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki sistem pengawasan yang mampu menghadapi tantangan distribusi melalui jalur tidak resmi, peredaran produk ilegal, dan klaim palsu. Loka POM di Kabupaten Mimika juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memperkuat upaya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang terdaftar dan terjamin keamanannya. Penguatan pengawasan di seluruh jalur distribusi, baik secara tradisional maupun daring, menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat peningkatan produksi dan distribusi produk obat dan makanan.

3. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Peningkatan jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan merupakan ancaman serius bagi Loka POM di Kabupaten Mimika. Pelanggaran ini mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya. Ancaman ini berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan

kepercayaan publik, dan merusak reputasi Loka POM di Kabupaten Mimika. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi keterbatasan sumber daya, kesulitan pengawasan, dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Mimika harus meningkatkan upaya pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik.

4. Perkembangan Teknologi di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi di bidang obat dan makanan membawa dampak signifikan bagi industri kesehatan dan pangan, menciptakan inovasi-inovasi baru yang meningkatkan kualitas dan efisiensi produk namun di balik kemajuan tersebut, ada sejumlah tantangan serius yang dapat menjadi ancaman bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika, khususnya terkait dengan kemampuan lembaga ini dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun teknologi dapat mendukung proses produksi yang lebih efisien dan aman, ada sejumlah faktor yang menjadikannya sebagai ancaman bagi pengawasan, yang dapat mempengaruhi efektivitas tugas Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Papua Tengah. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuatan obat dan makanan sintetis yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi oleh alat uji konvensional. Misalnya, teknologi baru dalam rekayasa genetika, bioteknologi, dan nanoteknologi memungkinkan pembuatan produk-produk yang sangat mirip dengan produk alami atau yang memiliki bentuk yang tidak biasa, namun berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* yang menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk membeli obat dan makanan, termasuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar. Produk-produk ilegal, baik itu obat-obatan, suplemen kesehatan, atau makanan yang tidak memiliki izin edar, dapat dengan mudah dijual melalui platform online. Loka POM di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengontrol peredaran produk ilegal ini, terutama karena banyak transaksi terjadi secara online dan terkadang melibatkan pihak luar daerah, bahkan luar negeri. Sistem yang ada untuk mengawasi peredaran produk secara fisik di pasar tradisional atau modern tidak sepenuhnya efektif dalam memantau perdagangan melalui *e-commerce*, yang sering kali sulit dilacak dan tidak terikat oleh batasan geografis.

Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam industri obat dan makanan untuk mengakali sistem pengawasan. Teknologi modern, seperti

pemalsuan label, rekayasa produk yang menyerupai produk legal, atau penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar, dapat sangat menyulitkan bagi Loka POM Mimika untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran produk ilegal. Dengan semakin banyaknya produk obat dan makanan yang berbasis data atau smart technology seperti obat yang dilengkapi dengan sensor untuk pemantauan kesehatan atau makanan yang dapat terhubung dengan aplikasi untuk pemantauan status gizi maka Loka POM di Kabupaten Mimika perlu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengawasi produk-produk tersebut.

Produk-produk berbasis data ini tidak hanya memerlukan pengawasan fisik, tetapi juga pemantauan digital yang memadai. Loka POM di Kabupaten Mimika harus beradaptasi dengan tren baru dalam teknologi berbasis data ini agar dapat memantau keamanannya, namun hal tersebut memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam serta sumber daya untuk mengelola dan melakukan verifikasi data yang masuk. Ketidaksiapan untuk mengelola tantangan baru ini bisa menyebabkan pengawasan yang kurang optimal terhadap produk-produk yang menggunakan teknologi ini. Dalam menghadapi tantangan ini, Loka POM di Kabupaten Mimika perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan inovasi dalam sistem pengawasan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh, guna menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Papua Tengah

5. Kondisi Geografis dan Kamtibmas

Papua Tengah memiliki wilayah yang luas dan topografi yang sangat beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai. Wilayah yang luas ini membuat jangkauan pengawasan lebih besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Papua Tengah memiliki kerawanan keamanan yang terkadang mengalami ketegangan dan konflik sosial yang dapat mempengaruhi situasi ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran pengawasan dan penegakan regulasi obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Selain itu, dengan adanya masalah keamanan yang kurang kondusif dan kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa wilayah menjadi ancaman yang memperlambat bahkan membatasi pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat karena masyarakat tidak terpapar akan informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang Aman. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan Kamtibmas, Loka POM di Kabupaten Mimika dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif

dan responsif terhadap tantangan yang ada, serta memastikan pelaksanaan program pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

6. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan obat dan makanan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sebagian stakeholder, seperti perangkat desa, produsen, pedagang di pasar, dan konsumen, juga merupakan ancaman yang signifikan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mereka mungkin belum memahami pentingnya mematuhi keamanan pangan yang lebih ketat terkait keamanan pangan dan obat. Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang menyeluruh, pengawasan akan menjadi terhambat, bahkan berisiko menurunkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan stakeholder agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Mimika adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya pengawasan obat dan makanan. Banyak masyarakat di daerah ini yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat dan makanan yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk melaporkan produk yang mencurigakan atau yang tidak memenuhi standar, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran barang ilegal. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku industri, Loka POM di Kabupaten Mimika juga menghadapi masalah terkait kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap obat dan makanan bukan hanya tugas Loka POM di Kabupaten Mimika semata, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengawasan serta tidak adanya kebijakan daerah yang mendukung secara maksimal, menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Mimika. Regulasi yang tidak didukung dengan penegakan yang kuat, pemahaman dan dukungan dari stakeholders tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas. Regulasi yang ada terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sudah cukup baik, namun seringkali implementasi di lapangan tidak didukung dengan penegakan yang kuat. Misalnya, tindakan preventif atau penindakan terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Loka POM di Kabupaten Mimika dan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Tanpa adanya dukungan yang cukup dalam hal penegakan hukum, produk

yang melanggar standar atau bahkan berbahaya tetap dapat lolos dari pengawasan dan tetap beredar di pasar.

7. Literasi Masyarakat Yang Masih Rendah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Papua Tengah merupakan salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat literasi yang rendah, 3 (tiga) provinsi dengan Tingkat literasi terendah yaitu; Papua Pegunungan (71,68%), Papua Tengah (85,57%), dan Papua Selatan (96,17%). Rendahnya tingkat literasi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal seperti sebagian wilayah Papua Tengah, menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk yang dikonsumsi berpotensi menimbulkan berbagai ancaman strategis, antara lain:

1. **Tingginya Risiko Konsumsi Produk Ilegal atau Berbahaya**
Masyarakat dengan literasi rendah cenderung tidak mampu membedakan antara produk legal dan ilegal, tidak memahami pentingnya izin edar, label yang benar, serta tidak mampu mengidentifikasi produk kedaluwarsa atau mengandung bahan berbahaya.
2. **Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif**
Salah satu pilar keberhasilan pengawasan adalah keterlibatan masyarakat dalam melaporkan temuan produk bermasalah. Namun, masyarakat dengan pemahaman terbatas terhadap regulasi dan risiko, cenderung pasif atau bahkan tidak menyadari adanya pelanggaran.
3. **Terbukanya Celah Bagi Pelaku Usaha Nakal**
Rendahnya tuntutan konsumen terhadap produk yang aman dan bermutu dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengedarkan produk tanpa memperhatikan standar keamanan dan mutu.
4. **Rentannya Masyarakat terhadap Iklan dan Promosi Menyesatkan**
Literasi yang rendah membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh klaim berlebihan atau iklan menyesatkan, terutama pada produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang belum terbukti secara ilmiah.
5. **Tantangan dalam Implementasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**
Rendahnya literasi, ditambah dengan hambatan bahasa lokal dan budaya, menyulitkan efektivitas penyampaian pesan edukasi dalam kegiatan KIE, terutama di daerah dengan keragaman budaya dan keterbatasan akses informasi.

6. Kesulitan dalam Mengubah Perilaku Konsumen

Upaya pembinaan dan edukasi tidak serta merta menghasilkan perubahan perilaku konsumsi yang aman dan cerdas, karena terbatasnya daya tangkap dan kebiasaan turun-temurun yang sulit diubah tanpa pendekatan yang intensif dan berkelanjutan.

Tabel 1.6 Matriks ringkasan analisis SWOT

Strength	Weakness
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Tersedianya regulasi yang mendukung tupoksi 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang andal 4. Sistem Pelayanan Publik yang memadai 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implementasi Inovasi 6. Sistem Pengawasan Yang Memadai	1. Keterbatasan Jumlah SDM 2. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal 4. Keterbatasan Kapasitas Laboratorium 5. Kelembagaan yang belum memadai
Opportunities	Threats
1. Tuntutan/Ekspektasi yang tinggi Stakeholder terhadap kinerja BPOM 2. Dukungan Stakeholder dan supra system 3. Kerjasama Yang Baik Dengan Stakeholder 4. Pertumbuhan UMKM 5. Perkembangan Teknologi 6. Pembentukan Daerah Otonomi Baru	1. Perubahan pola konsumsi Masyarakat terkait Obat dan Makanan 2. Peningkatan produksi dan distribusi Obat dan Makanan Yang tidak memenuhi ketentuan 3. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 4. Perkembangan Teknologi di bidang Obat dan Makanan 5. Kondisi Geografis dan Kamtibmas 6. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan obat dan makanan 7. Literasi Masyarakat Yang Masih Rendah

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI
KABUPATEN MIMIKA**

2.1 Visi

Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Provinsi Papua Tengah, bertugas melakukan pengawasan berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini

dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

2.2 Misi



Gambar 2.1 Asta cita Presiden dan Wakil Presiden

Loka POM di Kabupaten Mimika mendukung pelaksanaan Asta Cita sebagaimana menjadi agenda pembangunan nasional Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan ini diwujudkan melalui penyelarasan program, kegiatan, serta kebijakan pengawasan obat dan makanan di daerah, sebagai bagian dari kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Loka POM di Kabupaten Mimika utamanya mendukung aspek Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perlindungan anak perempuan,” namun demikian BPOM juga mendukung Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi - Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM : Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan

usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima : Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG

untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase

cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Loka POM di Kabupaten Mimika dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2025-2029

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> <i>Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai AKIP UPT BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2 Indikasi Resiko

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak dapat dilakukan pengujian sampel	Melakukan pengemasan sampel sesuai dengan kondisi penyimpanan dan koordinasi dengan pihak ekspedisi terkait dengan kondisi sampel dengan penanganan khusus	Fungsi Pemeriksaan
(SK 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tindak lanjut hasil pengawasan kurang atau tidak direspon oleh pelaku usaha	- Mengirimkan surat permintaan CAPA kembali - Memberikan penjelasan cara penyelesaian CAPA	Fungsi Pemeriksaan
(SK 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemenuhan SKL yang tidak maksimal	Optimalisasi pengujian menggunakan reagen yang sudah ada untuk pemenuhan SKL	Fungsi Infokom
(SK 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengujian sampel tidak terlaksana	Koordinasi dengan PPPOMN terkait juknis pengujian mini lab atau rapid test, koordinasi dengan pihak supplier terkait stok reagen, koordinasi dengan balai koordinator dan lab baku pembanding terkait pengadaan baku pembanding	Fungsi Pengujian
(SK 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kesimpulan hasil penandaan tidak sesuai dengan kesimpulan Pusat	menyamakan persepsi antara petugas pusat dan petugas UPT di dalam melakukan penilaian	Fungsi Pemeriksaan
(SK 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keberagaman produk beredar tidak dapat disesuaikan dengan pedoman sampling	Penggantian jenis sampel kepada kedeputian terkait	Fungsi Pemeriksaan

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengawasan di beberapa daerah yang menjadi tidak optimal	Penggantian sarana target kepada ke deputian terkait	Fungsi Pemeriksaan
(SK 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kualitas dan mutu Makanan yang disajikan tidak memenuhi syarat keamanan	Meningkatkan koordinasi terkait MBG di setiap wilayah kerja	Loka POM di Kabupaten Mimika
(SK 3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Sarana digital untuk KIE berkurang dari tahun sebelumnya	Intens mem-follow up kegiatan operasi dan menambah sarana informasi lain, seperti banner, sms blasting, billboard, dan podcast.	Fungsi Infokom
(SK 3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Terganggunya jadwal pelaksanaan program PJAS	1. Memajukan Waktu Penyelesaiannya mengikuti jadwal Libur Sekolah 2. Berkoordinasi dengan Pihak Sekolah terkait pelaksanaan Program tersebut.	Loka POM di Kabupaten Mimika
(SK 3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Survey sulit untuk dilaksanakan karena tidak tersedianya responden yang memadai	Pendampingan pada saat pengisian isi survey	Fungsi Infokom
(SK 3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Program Nasional (Program pasar aman) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Survey dan koordinasi dengan dinas terkait	Fungsi Infokom
(SK 3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tidak terdapat kemandirian dalam penerapan prinsip keamanan pangan pada komunitas (Sekolah, Desa, dan Pasar)	Interfensi dan pendampingan yang maksimal terhadap komunitas	Fungsi Infokom

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 4) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha tidak mampu untuk memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat	Melakukan pendampingan dalam pembuatan SOP dan pengisian aplikasi yang berkaitan dengan penerbitan izin	Fungsi Sertifikasi
(SK 5) Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyelesaian berkas perkara tidak sesuai dengan perencanaan penyidikan	1. Melakukan Koordinasi, Konsolidasi pada Dirtipisus/Kasatreskrim, Aspidum/Kasipidum dalam penunjukan (Jaksa P-16) , melakukan komunikasi baik secara formal dan informal dalam penanganan berkas perkara sehingga harapannya sudah terbangun satu kesatuan pandangan hukum dalam pemenuhan syarat formil dan materil dari berkas perkara. 2. melakukan koordinasi berjejang dengan kepala unit, Dir.Penyidikan, Deputi Penindakan (BPOM) maupun, Korwas PPNS serta pihak pengadilan tempat gugatan prapid tersebut disidangkan. 3. mengupayakan wewenang yang di berikan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa (Penahanan) serta koordinasi dengan KORWAS PPNS dan Tahti di Kepolisian. 4. mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan melakukan perencanaan yang mendetail dalam	1. Fungsi Penindakan 2. Korwas PPNS POLDA/POLRES 3. Kejaksan 4. Tersangka (Keluarga dan Penasehat Hukum)

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		penyelesaian berkas perkara.	
(SK 5) Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Adanya kebocoran informasi pada saat petugas melakukan operasi penindakan sehingga gagal melakukan penindakan terhadap target	Pemberian informasi dan koordinasi dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan	Fungsi Penindakan
(SK 5) Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	staff pada fungsi penindakan sudah dikenal oleh masyarakat	1. Melakukan Perencanaan dan Monev 2. melakukan cover dan matbar lebih spesifik	Loka POM di Kabupaten Mimika
(SK 6) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kegiatan Penggalangan tidak maksimal dilaksanakan	1. melakukan kegiatan penggalangan bersama-sama dengan fungsi Infokom 2. Melakukan penggalangan secara tidak langsung kepada lintas sektor melalui kegiatan - kegiatan penyidikan	Fungsi Penindakan
(SK 6) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Petugas pada fungsi penindakan UPT tidak dapat menginput laporan sesuai dengan time line yang diberikan pusat	1. Melakukan perencanaan dalam tahap awal penyusunan SKP di fungsi Penindakan agar setiap bulan dilakukan input sebelum tanggal time line 25 setiap bulannya 2. saling mengingatkan sesama tim di fungsi penindakan maupun di WA Group yang di buat oleh Dir Siber guna mengingatkan penginputan data laporan siber dan apabila ada maintenance atas aplikasi dan web tersebut	Fungsi Penindakan

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 6) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kompetensi PFM Muda yang ditempatkan di fungsi penindakan belum memadai di fungsi tersebut	1. Melakukan pembelajaran mandiri baik dari bahan materi dari ketua tim penindakan 2024 maupun dari contoh dan laporan analisi tahun 2024 2. diskusi dengan tim penindakan	Fungsi Penindakan
(SK 6) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	staff pada fungsi penindakan sudah dikenal oleh masyarakat	1. Melakukan Perencanaan dan Monev 2. melakukan cover dan matbar lebih spesifik	Loka POM di Kabupaten Mimika
(SK 7) Layanan Publik UPT yang Prima	Tidak tercapainya responden dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat	Follow up dan Pendampingan dalam pengisian survey	Fungsi Infokom
(SK 7) Layanan Publik UPT yang Prima	Nilai IPP masih sulit untuk dimaksimalkan	Membuat perencanaan terkait penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	Fungsi Infokom
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Surat berharga tidak disimpan secara khusus sehingga mudah tercecer.	Penyimpanan surat berharga di brankas	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terdapat PAGU minus	Melakukan monitoring penggunaan anggaran	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kesalahan memilih COA	Rekonsiliasi antara PPK dan operator	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terjadinya selisih uang sampling	Melakukan pembelian sampel secara non tunai	Fungsi Pemeriksaan

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Mata Akun Anggaran Kegiatan Tidak Tersedia pada Beberapa Kegiatan Yang Mendadak ataupun kegiatan yang diluar Perencanaan	pembuatan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan dimonitoring agar dapat melaksanakan sesuai RPD	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terganggunya penginputan pertanggungjawaban keuangan	Menggunakan notifikasi Maintenance untuk Memaksimalkan penginputan pertanggungjawaban secara rutin.	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Keterlambatan Pelaporan dan pembayaran Pajak	1. melakukan Koordinasi dengan KPP setempat 2. Menghubungi Call Center KPP Setempat 3. melakukan percobaan penginputan sebelum timeline	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pengujian tidak dapat dilakukan	Pemenuhan SDM untuk fungsi pengujian	Fungsi Infokom
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kurangnya pegawai jabatan fungsional tertentu	Memenuhi jabatan fungsional tertentu yang kosong	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya potensi gratifikasi dari pelaku usaha pada saat kegiatan pemeriksaan, sertifikasi dan penindakan	Sosialisasi Tolak Gratifikasi kepada Internal dan juga Eksternal (Masyarakat) dan memberikan sanksi kepada petugas yang terliba	Fungsi Tata Usaha
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Aplikasi tidak dapat digunakan	Membuat back up data secara manual.	Fungsi Tata Usaha
(SK8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kerusakan fisik BMN, kerusakan jaringan dan software komputer	Pengecek fisik BMN secara berkala	Fungsi Tata Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
(SK 8) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terjadinya bencana (kebakaran, gempa bumi, kerusakan)	Pemasangan APAR	Fungsi Tata Usaha

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.
Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UPT

Arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Loka POM di Kabupaten Mimika mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM dengan strategi-strategi sebagai Berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan post market di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk kepada masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pengawasan ke 8 Kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan onsite : Dengan menitikberatkan pada peredaran produk ilegal, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan kegiatan penindakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM: Loka POM di Kabupaten Mimika mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu dari produk olahannya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri maupun internasional. Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pembinaan dan pendampingan di seluruh wilayah kerjanya kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha UMKM untuk memperoleh ijin edar dari produk yang dihasilkan.
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi berupa sosialisasi secara masif baik secara langsung maupun melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Mimika yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat agar dapat turut serta mengawasi dan melaporkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar. Selain itu, membentuk kader pengawasan Obat dan Makanan sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam penyebaran informasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman.
5. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Loka POM di Kabupaten Mimika bersinergi dengan lintas sektor yang ada di wilayah kerjanya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan aman dengan kemitraan dan adanya penandatanganan MoU yang merupakan implementasi Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pengujian laboratorium dalam

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Mimika diharapkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi lebih efektif dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi baik yang dilakukan secara internal BPOM maupun internasional. Loka POM di Kabupaten Mimika juga meningkatkan infrastruktur teknologi mini laboratorium dengan melakukan pemenuhan alat laboratorium sesuai standar Loka POM dan metode pengujian yang sesuai

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan: Loka POM di Kabupaten Mimika memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis elektronik sehingga dapat menjangkau dan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika
Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan post market di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk kepada masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pengawasan ke 8 Kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja.
Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.	Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan onsite : Dengan menitikberatkan pada peredaran produk ilegal, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan kegiatan penindakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.	Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM: Loka POM di Kabupaten Mimika mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu dari produk olahannya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri maupun internasional. Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pembinaan dan pendampingan di seluruh

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika
	wilayah kerjanya kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha UMKM untuk memperoleh ijin edar dari produk yang dihasilkan.
Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM: Loka POM di Kabupaten Mimika mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu dari produk olahannya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri maupun internasional. Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pembinaan dan pendampingan di seluruh wilayah kerjanya kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha UMKM untuk memperoleh ijin edar dari produk yang dihasilkan.
Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.	Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Loka POM di Kabupaten Mimika bersinergi dengan lintas sektor yang ada di wilayah kerjanya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan aman dengan kemitraan dan adanya penandatanganan MoU yang merupakan implementasi Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan	Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pengujian laboratorium dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika
	Olahan : Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Mimika diharapkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi lebih efektif dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi baik yang dilakukan secara internal BPOM maupun internasional. Loka POM di Kabupaten Mimika juga meningkatkan infrastruktur teknologi mini laboratorium dengan melakukan pemenuhan alat laboratorium sesuai standar Loka POM dan metode pengujian yang sesuai
Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan: Loka POM di Kabupaten Mimika memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis elektronik sehingga dapat menjangkau dan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Unit Loka POM di Kab. Mimika juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Diantaranya seperti menyediakan media KIE yang inklusif seperti video bersubtitel dan audio edukasi. Sehingga menjamin informasi dapat diakses oleh semua kelompok tanpa diskriminasi. Selain itu juga dilaksanakan KIE yang mencakup isu Kesehatan Perempuan, dan pelayanan publik pada kelompok rentan yang telah diterapkan di unit kerja maupun di Mall Pelayanan Publik. Loka POM di

Kabupaten Mimika berkomitmen melaksanakan pelayanan publik secara responsif gender dan inklusif dengan memastikan setiap Masyarakat dan komunitas mendapatkan pelayanan publik yang setara. Setiap perencanaan serta monitoring evaluasi program Loka POM Mimika mengintegrasikan responsif gender pada program yang dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Tengah. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting Adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre- market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Loka POM Kabupaten Mimika menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian;
3. Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Melaksanakan sampling produ Obat dan Makanan;
5. Melaksanakan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
6. Melaksanakan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
7. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

8. Melakukan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui patrol siber;
9. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Melaksanakan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika, pengelolaan SDM di tahun 2025-2029 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan Loka POM di Kabupaten Mimika. Selain SDM, sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan. kegiatan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mendukung program manajemen dan pengelolaan sarana dan prasarana melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan sarana dan prasarana internal.
2. Layanan dukungan manajemen satuan kerja.
3. Layanan perkantoran.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Mimika selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Mimika, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Utama, dan Target Kinerja Loka POM di Kab. Mimika 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	85.25	86.50	87.75	89.00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.50	95.25	96.00	96.75	97.50
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.00	93.00	94.00	94.80	95.60
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	12	13	16	20
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	12,50	12,50	25,00	25,00	37,50
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.35	88.22	89.09	89.97	90.84
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2	2	2
	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampaingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	8.33	20.83	37.50	58.33	83.33
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	77	79	80	81

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.18	75.28	75.38	75.48	75.58
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	4	4	4	4
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab. Mimika berdasarkan kegiatan

Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.931	2.124	2.336	2.570	2.827
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.330	2.563	2.820	3.102	3.412
Total	4.261	4.687	5.156	5.672	6.239

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab. Mimika berdasarkan sumber dana

Sumber Dana	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	4.261	4.687	5.156	5.672	6.239
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
Total	4.261	4.687	5.156	5.672	6.239

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Mimika diharapkan mampu:

- a. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kab. Mimika 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra Loka POM di Kab. Mimika 2025- 2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntut BPOM untuk melakukan perubahan untuk peningkatan kinerja yang optimal.

Renstra Loka POM di Kab. Mimika 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kab. Mimika baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Mimika									4.261,0	4.687,0	5.156,0	5.672,0	6.239,0	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.931,0	2.124,0	2.336,0	2.570,0	2.827,0	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Mimika	84	85,25	86,50	87,75	89,00						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	88	90	92	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		94,50	95,25	96,00	96,75	97,50						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		92,00	93,00	94,00	94,80	95,60						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11,5	12	13	16	20						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		12,50	12,50	25,00	25,00	37,50						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	35	35	35	35						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			51	51	52	55	58						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			168	170	177	188	196						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			11	11	12	13	14						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			177	197	213	232	249						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		0	84	84	84	84						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	131	131	131	131						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												UPT BPOM
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,35	88,22	89,09	89,97	90,84						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	2	2	2	2						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			79	100	120	144	173						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			23	8	12	15	18						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2	2	2	2	2						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		8,33	20,83	37,50	58,33	83,33						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			1	3	4	5	6						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		75	77	79	80	81						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	1	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
1	Indeks Pelayanan Publik UPT			3,60	3,70	3,80	3,90	4,00						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			10	17	18	19	23						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0	0	0	0	0						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		75,18	75,28	75,38	75,48	75,58						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		4	4	4	4	4						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		0	0	0	0	0						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		0	0	0	0	0						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		10	10	10	10	10						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.330,0	2.563,0	2.820,0	3.102,0	3.412,0	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM